

# Seri Bunga Rampai Kontribusi Pendidikan Ilmu Sosial dalam Membangun Keindonesiaan

Oleh: Hispisi  
(Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)

**Editor:**  
**Ari Wahyudi**  
**Oksiana Jatiningsih**



**Penerbit**  
**Unesa University Press**

# **Seri Bunga Rampai**

## **Kontribusi Pendidikan Ilmu Sosial dalam Membangun Keindonesiaan**

**Oleh: Hispisi**

**(Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)**

Diterbitkan Oleh

**UNESA UNIVERSITY PRESS**

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : [unipress@unesa.ac.id](mailto:unipress@unesa.ac.id)

[unipressunesa@yahoo.com](mailto:unipressunesa@yahoo.com)

vii,231 hal., Illus, 15,5 x 23

**ISBN: 978-602-449-418-6**

copyright © 2020 Unesa University Press

*All right reserved*

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit*

# KATA PENGANTAR

## Ketua Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)

Ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, ilmu harus ditransfer kepada generasi berikutnya melalui pendidikan, agar mereka mampu menjelaskan berbagai fenomena yang ada. Ilmu sosial akan memberikan narasi yang menjelaskan hubungan kausalitas dari berbagai fenomena yang ada melalui teori-teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Dengan berbekal ilmu, khususnya ilmu sosial, seseorang diharapkan mampu menjelaskan realitas sosial dan sekaligus mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Di sisi lain, pendidikan juga menjadi sarana untuk membantu seseorang mengembangkan dan sekaligus melakukan perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku. Dengan bahan ilmu sosial, Pendidikan ilmu sosial diharapkan mampu merubah seseorang menjadi semakin bijak dalam bersikap dan bertindak.

Dalam konteks ini, kerjasama antara ilmu sosial dan pendidikan ilmu sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Ilmu sosial akan terus mensuplai bahan yang dibutuhkan oleh pendidikan ilmu sosial, dan sekaligus menginformasikan perkembangan teori sebagai hasil abstraksi dan refleksi atas realitas sosial. Sedangkan pendidikan ilmu sosial yang membentuk karakter seseorang melalui suatu proses pemahaman dan penyadaran atas apa akibat yang terjadi jika suatu sikap dan tindakan dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan ilmu sosial diharapkan mampu memahamkan dan menyadarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur, dengan sumber daya alam yang kaya dan melimpah sebagai modal kemajuan. Meskipun demikian, jika karakter bangsa ini tidak baik, modal tersebut bisa menjadi sumber kehancuran. Perilaku korup yang dilakukan oleh para elit bisa menjadi penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Ketidapkahaman dan

ketidaksadaran rakyat atas sistem demokrasi ternyata bisa menjadi penyebab perilaku korupsi.

Sebagai bangsa yang majemuk dengan multikulturnya, diperlukan sikap toleran dan menempatkan kesederajatan dalam perbedaan. Jika sikap tersebut tidak dimiliki, kemajemukan dan multikultur akan menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Di sisi lain, kekayaan alam yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik juga akan menjadi bumerang bagi penghuninya. Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam, akan menyebabkan alam menjadi semakin “garang” terhadap kita. Diperlukan kearifan dalam mengelola lingkungan, sehingga kelestarian fungsinya dalam mendukung kehidupan bisa terus terpelihara dan terjaga. Oleh karena itu, pendidikan ilmu sosial menjadi hal yang perlu digandeng dalam pembangunan bangsa, untuk membangun karakter wisdom.

Buku ini hadir sebagai bagian dari kepedulian para ilmuwan sosial dan para pendidik ilmu sosial atas kondisi bangsa. Buku ini menyadarkan bahwa masih banyak masalah sosial yang harus ditangani, agar pembangunan bangsa tidak terhambat oleh berbagai konflik sosial dan karakter buruk. Pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik, memang diperlukan, tetapi jika sampai terjadi konflik sosial, semua akan rusak dan sia-sia. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat bagi pembacanya.

Terima kasih.

Surabaya; Januari 2020

Ketua Hispisi

Ttd

Prof. Dr. Warsono, M.S.

# DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pancir	ii
Kata Pengantar Ketua HISPISI	iii
Daftar Isi	v

## Bagian 1.

<b>MEMBANGUN INDONESIA DI INDONESIA DINAMIKA KONTESTATIF DARI <i>NATION</i> KE <i>NATION STATE</i> – <i>Musta'in Mashud</i> – <i>Dosen Departemen Sosiologi Unair</i></b>	<b>(1-27)</b>
---	---------------

## Bagian 2.

<b>PENANAMAN NILAI KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 MELALUI MODEL <i>ECO-EDUTAINMENT</i> DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SMP KOTA SEMARANG - <i>Apik Budi Santoso; Dewi Liesnoor Setyowati; Wasino</i> - <i>Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNNES.</i></b>	<b>(28-46)</b>
--	----------------

## Bagian 3.

<b>HAMBATAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN JURNAL ILMIAH: <i>Pengalaman di Fakultas Ilmu Sosial UNNES</i> - <i>Tsabit Azinar Ahmad</i> - <i>Jurusan Sejarah.</i></b>	<b>(47-55)</b>
--	----------------

## Bagian 4.

<b>PEMETAAN KETERSERAPAN ALUMNI JURUSAN GEOGRAFI FIS UNNES DI DUNIA INDUSTRI MELALUI METODE <i>TRACER STUDY</i>- <i>Tjaturahono Budi Sanjoto<sup>1</sup>, Saptono Putro<sup>1</sup>, Juhadi<sup>1</sup></i> <i>Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.</i></b>	<b>(56-68)</b>
--	----------------

**Bagian 5.**

**IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI MELALUI  
PENDIDIKAN IPS DALAM MEMPERKUAT JATI  
DIRI BANGSA - Ricu Sidiq, Flores Tanjung, Najuah - Dosen  
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosia, Universitas Negeri  
Medan.**

(69-78)

**Bagian 6.**

**URGENSI MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL  
DALAM KEBUTUHAN PENGUATAN JATIDIRI  
BANGSA - Apeles L. Lonto dan Wenly R.J. Lolong - Dosen  
Jurusan PPKn FIS Unima.**

(79-93)

**Bagian 7.**

**PENGEMBANGAN MATERI STUDI MASYARAKAT  
INDONESIA YANG BERWAWASAN KEINDONESIAN  
– Lukitaningsih - Department of History Education, Universitas  
Negeri Medan.**

(94-111)

**Bagian 8.**

**MEMPERKUAT IDENTITAS KE INDONESIAAN  
MELALUI PEMBELAJARAN ANTROPOLOGI  
DALAM KURIKULUM IPS – Rosramadhana - Dosen Prodi  
Pendidikan Antropologi FIS Unimed**

(112-121)

**Bagian 9.**

**PERAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DALAM  
PEMBANGUNAN BANGSA –Warsono - Guru Besar Prodi  
PPKn FISH Unesa**

(122-137)

**Bagian 10.**

**MERAJUT KE-INDONESIAAN: MENYELAMI  
PIKIRAN *FOUNDING FATHERS* ASAL  
MINANGKABAU TENTANG INTEGRASI BANGSA -  
Siti Fatimah, Uun Lionar - Fakultas Ilmu Sosial, Universitas  
Negeri Padang.**

(138-163)

**Bagian 11.**

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI AKAR MASALAH  
DAN SOLUSI – Warsono - Dosen PMPKn FISH Universitas  
Negeri Surabaya.**

**(164-179)**

**Bagian 12.**

**ISLAMIC HISTORY DALAM KONTEKS SOSIO-  
KULTURAL INDONESIA - Muhammad Turhan Yani -  
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri  
Surabaya.**

**(180-186)**

**Bagian 13.**

**INDIGENISASI ILMU-ILMU SOSIAL DI INDONESIA:  
LANGKAH YANG MASIH TERSEOK - Ajat Sudrajat –  
Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta**

**(187-208)**

**Bagian 14.**

**FILSAFAT ILMU SOSIAL INDONESIA: ARTI  
PENTING, KARAKTERISTIK DAN PROSPEK  
PENGEMBANGANNYA - Heri Santoso – Dosen Filsafat  
Ilmu Sosial – Universitas Gadjah Mada**

**(209-222)**

**Bagian 15.**

**PENDIDIKAN GEOGRAFI DAN TANTANGAN ABAD 21  
Dr. Muhammad Zid, M.Si dan Fauzi Ramadhoan AR, S.Pd. MA –  
Universitas Negeri Jakarta**

**(223-230)**

**Catatan Akhir**

**231**

## INDIGENISASI ILMU-ILMU SOSIAL DI INDONESIA: LANGKAH YANG MASIH TERSEOK

Ajat Sudrajat<sup>2</sup>  
ajat@uny.ac.id

*Indigenous knowledge*, demikian istilah yang dipakai oleh CBNRM (Community-Based Natural Resource Management Program) didefinisikan sebagai pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok orang sepanjang generasi dalam hubungannya dengan alam. Pada umumnya pengetahuan yang demikian berkembang pada lingkungan lokal dan secara khusus sesuai dengan kepentingan dan keadaan penduduk lokal. Pengetahuan ini berkembang sepanjang waktu dan terus berkembang. Pengetahuan ini berkembang bersandarkan pada pengalamannya, berlaku terus-menerus bahkan berabad-abad, sesuai dengan kebudayaan lokal, dan selalu mengalami dinamika dan perubahan.<sup>3</sup>

*Indigenous knowledge* kadang-kadang dipertentangkan dengan “pengetahuan ilmiah, Barat, dan internasional” atau “pengetahuan modern” --pengetahuan yang dikembangkan oleh universitas dan lembaga-lembaga riset yang menggunakan pendekatan-pendekatan formal ilmiah. Namun demikian, menurut Agrawal, terdapat tumpang tindih antara pengetahuan indigenis dan pengetahuan Barat, dan sangat sulit untuk membedakan diantara keduanya. Apalagi dalam

---

<sup>2</sup> Dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

<sup>3</sup> Steve Langill dan Sam Landon, *Indigenous Knowledge*, Canada: IDRC-Lib, 1998, hlm. 7.



kenyataannya, pengetahuan indigenis selalu berkembang, dan kaangkadang sulit untuk menentukan apakah pengetahuan atau teknologi itu benar-benar indigenis atau mengadopsi dari luar.<sup>4</sup>

Sejalan dengan penggunaan istilah *indigenous knowledge* di atas, istilah *indigenization* dipakai dalam kerangka yang hampir senada meskipun dalam perspektif yang lain. Secara etimologis, indigenisasi sepadan dengan istilah pribumisasi atau pemribumian. Terminologi indigenisasi memiliki bermacam-macam makna. Apabila ditinjau dari aspek sosiologis pengetahuan, indigenisasi memiliki makna berbedabeda di negara yang satu dengan yang lain. Istilah indigenisasi muncul dan berkembang terutama di bekas negara jajahan Barat. Di Filipina misalnya, indigenisasi memiliki dua makna, yakni, pertama, perlunya membangun teori dan metodologi yang lebih cepat untuk memahami masyarakat Filipina dan untuk memecahkan masalah sosial yang dianggap khusus bagi masyarakat; kedua, dimaknai sebagai pembentukan teori dan ‘metode pribumi’ atau metodologi ilmu sosial khas Filipina. Dengan demikian, indigenisasi tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga pada tataran metodologis.<sup>5</sup>

Di Malaysia, indigenisasi menemukan bentuknya dalam gerakan ‘domestikasi’ yang dimaksudkan sebagai ‘penjinakan’ terhadap ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi. Penjinakan dilakukan dengan mengorganisasikan ke dalam studi lapangan atau studi antropologis yang bermotif etnis. Kasus indigenisasi yang menjadi domestikasi di Malaysia menunjukkan besarnya intervensi politik dalam kebijakan pengembangan ilmu sosial. Sementara itu, indigenisasi di dunia Islam atau dalam pemikiran Islam sering diidentikkan dengan pengertian Islamisasi ilmu-pengetahuan,

---

<sup>4</sup> Steve Langill dan Sam Landon, *Indigenous Knowledge*, Canada: IDRC-Lib, 1998, hlm. 7.

<sup>5</sup> Hari Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gama Media, 2003, hlm. 54-55.

yang sekaligus sebagai reaksi atas sekularisasi dan westernisasi ilmu, dengan tokoh utamanya Ismail Raji al-Faruqi.<sup>6</sup>

Ignes Kleden, seperti dinyatakan oleh Hari dan Listiyono, pengertian pribumisasi ilmu sosial di Indonesia, dipandang sebagai gerakan partikularisme. Dalam pengertian ini terkandung kecenderungan untuk mengecualikan ilmu-ilmu sosial dari komunitas ilmu sosial internasional. Kecenderungan tersebut disebabkan alasan politis bahwa masalah-masalah sosial suatu bangsa atau negeri tidak dapat dipecahkan oleh komunitas akademis internasional, melainkan harus dipecahkan oleh sarana-sarana lain yang lebih sesuai dengan kekhususan historis cultural dan lokalitas ssio-geografisnya.<sup>7</sup>

### Cermin Kegelisahan Intelektual

Dalam rubrik DIALOG, *Prisma* nomor 9 tahun 1984, yang diberi judul “Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia”, Taufik Abdullah (Ketua HIPIS Pertama, selama dua periode kepengurusan dari 1974-1979) memberikan ulasan atas permasalahan yang membelit bangsa dan kualitas manusia Indonesia dikaitkan dengan peran yang dimainkan oleh Ilmu-Ilmu Sosial. Menurutnya, teori-teori yang ada sekarang ini, lahir dan berkembang dari kegelisahan dan keprihatinan intelektual yang terjadi di dunia Barat. Teori-teori tersebut lahir dan berkembang di saat Barat sedang berada dalam suatu tahap peralihan dari masyarakat agraris menuju masyarakat kapitalis industri. Ketika negara menempatkan orang dari suasana *primordial* yang akrab ke dalam suasana yang makin *impersonal*, dan juga, di saat optimisme akan kemampuan akal mengalahkan alam belum mereda. Lebih jauh dinyatakannya, dari sudut pandang yang semacam inilah bisa

---

<sup>6</sup> Ismail Raji al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Bandung: Pustaka, 1995.

<sup>7</sup> Hari Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gama Media, 2003, hlm. 55.

dimengerti bahwa sejak kira-kira sepuluh tahun terakhir ini (1970an) di Asia Tenggara, bahkan di kawasan Pasifik, hasrat untuk mengadakan *indigenization* atau pempribumian konsep dan teori-teori ilmu-ilmu sosial sangat dirasakan.<sup>8</sup>

Apa yang dinyatakan Taufik Abdullah di atas sesungguhnya sejalan dengan perbincangan yang muncul pada saat dilakukannya simposium UNESCO dan UN Asia Development Institute pada tahun 1980an yang menyatakan mengenai pentingnya mencari dan memperkuat identitas ilmu sosial Asia; bahaya kolonialisme akademis; perlunya pembebasan pikiran dari penjara yang dibuat untuk Dunia Ketiga; dan pentingnya usaha untuk berdikari dalam ilmu sosial.<sup>9</sup> Sampai-sampai Soedjatmoko dengan tegas mengemukakan, betapa masih terbatasnya pengetahuan kita mengenai keanekaragaman wajah kemiskinan serta ketidaktahuan kita mengenai struktur sosial dan kebudayaan kemiskinan di negeri kita.<sup>10</sup>

Gugatan yang senada muncul dari Darodjatun Kuntjoro-Jakti, seraya menyatakan, adalah suatu hal yang ironis tapi merupakan fakta yang terlihat jelas, betapa kalangan cendekiawan Dunia Ketiga, praktis bersikap pasif di hadapan semua persoalan yang melilit dan sedang dihadapi bangsanya. Kalangan yang terdidik ini ternyata praktis tidak ikut serta dalam usaha penyelesaian masalah-masalah besar dari bangsanya, kalau pun mereka terlibat, belum dalam posisi yang orisinal yang benar-benar mewakili kepentingan Dunia Ketiga –sumbangan pikiran yang berupa alternatif pemikiran yang sifatnya merdeka. Kaum

---

<sup>8</sup> Taufik Adullah, “Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia”, dalam *Prisma*, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm.58-59.

<sup>9</sup> Farchan Bulkin, “Ilmu Sosial dan Dimensi Manusia”, dalam *Prisma*, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 33.

<sup>10</sup> Soedjatmoko, “Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan”, dalam Alfian dkk. (ed.), *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980, hlm. 50.

cendekiawan Dunia Ketiga belum melahirkan pemikiran-pemikiran alternatif yang merupakan tandingan dari pemikiran Barat.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dinyatakan Darodjatun Kuntjoro-Jakti, bahkan yang lebih ironis, ilmuwan Dunia Ketiga mengoper secara lengkap keseluruhan rincian sistem dan praktiknya, sementara para cendekiawan Barat mempertanyakan ‘relevansinya’ dari pikiran mereka yang terdahulu, dan mereka pun bahkan sudah meninggalkannya. Kenyataan yang demikian menimbulkan kesan bahwa seolah-olah para cendekiawan Dunia Ketiga tersebut bukan hanya ‘statis’ tetapi juga ‘enggán berubah’, bahkan tidak ingin repot berpikir dua atau tiga kali untuk menyesuaikan ilmu ‘kulakan’nya dengan konteks negaranya. Padahal, hanya dengan mempertimbangkan sasaran, konteks, dan memberikan alternatif, kesan bahwa cendekiawan Dunia Ketiga seperti sekumpulan “orang Barat” di “Dunia Timur” mestinya dapat dihindari.<sup>12</sup>

Setelah sekian lama atau setelah 30 tahun berlalu sejak keresahan, kegelisahan, kerisauan, dan sekaligus kesadaran intelektual itu muncul, maka pertanyaan yang mengemuka sekarang adalah, sudah sejauh mana para ilmuwan sosial memperkuat identitas keindonesiaan dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu sosial? Sudahkah para ilmuwan sosial mampu melepaskan diri dari penjara pola kolonialisme akademik? Adakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa para ilmuwan sosial telah memiliki ilmu sosial yang mandiri? Jawaban yang

---

<sup>11</sup> Darodjatun Kuntjoro-Jakti, “Cendekiawan Dunia Ketiga: Orang “Barat” di Dunia “Timur”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Peny.), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 220.

<sup>12</sup> Darodjatun Kuntjoro-Jakti, “Cendekiawan Dunia Ketiga: Orang “Barat” di Dunia “Timur”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (Peny.), *Cendekiawan dan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 235.

jujur dan terbuka dari pertanyaan-pertanyaan di atas tentu sangat ditunggu.

Kegelisahan itulah yang tampaknya dirasakan juga oleh Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI), KH Said Aqil Siradj. Pada saat terpilih sebagai Ketua MWA UI yang baru, Selasa, 15 Mei 2012, Said Aqil Siradj mengatakan, bahwa “pribumisasi ilmu pengetahuan di Indonesia sudah saatnya dilakukan”. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar hendaknya digali secara epistemologi, sehingga bisa dilakukan pembaruan bahkan penemuan baru. Jangan hanya menerima, dan membiarkan bahasa Indonesia menjadi kacau karena kebanjiran istilah asing, ujarnya lebih lanjut. Langkah pribumisasi mesti dilanjutkan untuk menemukan teori-teori baru, baik di bidang sosial, humaniora, maupun eksakta, sehingga, ilmu pengetahuan yang dikembangkan ilmuwan Indonesia bisa melahirkan teknologi yang maju dan setara dengan penemuan bangsa lain.

Lebih lanjut dinyatakannya, bahwa tugas tradisional untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong perubahan sosial belum bisa dituntaskan oleh perguruan tinggi di negeri ini. Dalam situasi pancaroba semuanya berubah, sementara masyarakat tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Situasi seperti ini mengharuskan perguruan tinggi melakukan langkah aksiologis, keluar dari kampus untuk mengkaji solusi berbagai persoalan yang terjadi.

Ia menantang UI untuk melakukan penggalian epistemologi, melakukan inovasi, dan invensi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sebagai barometer bagi perguruan tinggi lain di Indonesia, UI diharapkan mampu melakukan pribumisasi ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar. Hilangkan sikap konsumtif dalam bidang teori dan

pemikiran. Sudah saatnya akademisi muncul sebagai penggagas ide baru, demikian ditegaskan Said Aqil Siradj.<sup>13</sup>

Kritik terhadap ilmuwan sosial Indonesia selama ini adalah karena mereka terlalu mengagung-agungkan teori Barat dan belum dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada teori Barat tersebut. Padahal, teori Barat tersebut dilahirkan dalam konteks sosio-historis dan sosio-kultural yang berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kecenderungan ilmuwan tersebut dapat dipahami jika dikaitkan dengan sejarah pendidikan para ilmuwan sosial Indonesia generasi pertama. Kebanyakan ilmuwan sosial Indonesia adalah hasil pendidikan Barat, terutama Belanda dan Amerika.<sup>14</sup> Kondisi ilmuwan sosial Indonesia, seperti disinyalir oleh Ignas Kleden mirip dengan *ilmuwan bazar*, sebagaimana pedagang bazar dalam tindakan ekonomi. Salah satu cirinya antara lain cenderung menjadi pedagang pengecer dan bukan pedagang grosir; ilmuwan sosial juga cenderung mengecer ilmunya sehingga tidaklah terbentuk suatu *body of social science knowledge* yang handal.<sup>15</sup>

Kritik yang lebih komprehensif muncul dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syed Farid Alatas dengan judul *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, yang diterbitkan Mizan Publika tahun 2010.<sup>16</sup> Spirit dari buku tersebut menegaskan bahwa penjajahan akademis

---

<sup>13</sup> *Republika*, "Saatnya Pribumisasi Ilmu Pengetahuan Dilakukan", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/05/16/m43diu-saatnya-pribumisasi-ilmupengetahuan-dilakukan>, Rabu, 16 Mei 2012.

<sup>14</sup> Hanneman Samuel, *Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*, Jakarta: Kepik Ungu, 2010.

<sup>15</sup> Heri Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Rasmedia, 2007, hlm. 26.

<sup>16</sup> Syed Farid Alatas, *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia: Terhadap Terhadap Eurosentrisme*, Jakarta: Mizan Publika, 2010.

adalah fenomena yang setara dengan penjajahan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan itu. Dunia akademik yang terjajah adalah ketika bangsa penjajah berupaya melakukan kontrol atas ilmu pengetahuan di daerah jajahannya. Mereka menciptakan struktur kebergantungan akademis dan berusaha memonopoli penyebaran ide-ide ilmu pengetahuan yang tentu saja bias kepentingan penjajah.<sup>17</sup>

Bacaan Yanu Endar Prasetyo terhadap buku yang ditulis Syed Farid Alatas menegaskan bahwa Alatas berhasil mendiagnosis dan mengidentifikasi setidaknya delapan persoalan utama yang membelenggu ilmu sosial Asia untuk tumbuh dan berkembang secara universal:

*Pertama*, adanya bias *Eurosentris*, sehingga ide, model, pilihan masalah, metodologi dan bahkan prioritas riset cenderung semata-mata “membebek” pada karya Amerika, Inggris, Prancis dan Jerman. *Eurosentrisme* adalah sebuah teori sejarah dunia yang menempatkan Eropa sebagai sesuatu yang unik dan superior. Oleh karenanya, terbangun konstruksi yang melegitimasi bangsa Eropa untuk melakukan ekspansi ke seluruh dunia, termasuk melalui ide-ide rasionalisme, kapitalisme hingga pembangunanisme yang justru merintangangi kemajuan ekonomi, politik dan akademis bagi negara-negara koloninya di Asia.

*Kedua*, adanya kecenderungan pengabaian pada filsafat dan sastra lokal. Dalam konteks ini, filsafat khas Timur hanya dijadikan bahan atau objek kajian saja, tetapi tidak pernah berhasil diangkat menjadi sumber untuk konsep-konsep ilmu sosial.

*Ketiga*, ilmuwan sosial Asia gagal keluar dari jebakan teori dan metode yang berbau Euro-Amerika. Akibatnya, ilmu sosial Asia sangat

---

<sup>17</sup> Yanu Endar Prasetyo, “Keluar dari Penjajahan Akademik”, peresensi buku Syed Farid Alatas yang berjudul *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, pada *Harian Republika*.

kekurangan ide-ide orisinal dalam menumbuhkan perspektif, aliran, konsep atau inovasi dalam metode penelitiannya.

*Keempat*, adanya penyakit *mimesis* yang akut, yakni peniruan atau pengadopsian yang tidak kritis terhadap model ilmu sosial Barat. Hal ini menandakan keberhasilan internalisasi gagasan-gagasan Orientalisme dari Barat yang disebarluaskan dan dikonsumsi oleh wilayah yang menjadi objek konstruksi Orientalis.

*Kelima*, lahirnya diskursus yang secara esensial memposisikan masyarakat non-Barat itu memiliki ciri yang merupakan kebalikan dari masyarakat Barat, yaitu barbar, terbelakang, dan irasional.

*Keenam*, hilangnya sudut pandang minoritas, baik secara etnis maupun kelompok yang terpinggirkan lainnya, dalam catatan-catatan akademis ilmuwan Asia pada umumnya. Ilmu sosial selama ini telah nyata-nyata terdominasi oleh perspektif yang elitis, sehingga tidak berhasil menyuarakan pandangan-pandangan minoritas di Asia sendiri.

*Ketujuh*, persekutuan antara akademisi dengan negara. Hal ini tampak dalam peran-peran yang dimainkan disiplin geografi dan antropologi pada masa kolonial yang digunakan oleh negara untuk mempromosikan persatuan, kontrol atas kebijakan, dan penciptaan sebuah kebudayaan nasional.

*Kedelapan*, dominasi intelektual Dunia Ketiga oleh kekuatan-kekuatan ilmu sosial Dunia Pertama (AS, Inggris, Prancis). Hal ini dilanggengkan dalam bentuk kebergantungan ide, teori dan konsep, media gagasan, teknologi pendidikan, bantuan dana, dan investasi pendidikan.

Ilmuwan di Asia tampaknya keasyikan mempelajari masyarakatnya sendiri. Riset-riset mereka kebanyakan berupa riset empiris yang terkait kebijakan, sehingga sangat minim sumbangannya terhadap pengembangan teori. Dalam situasi demikian, buku yang ditulis Farid Alatas, berusaha untuk menyerukan kembali pentingnya diskursus



alternatif dalam tradisi ilmu sosial di Asia. Kebergantungan akademis yang dilanggengkan melalui pelatihan dan kucuran dana riset dari Amerika dan Eropa harus dikurangi. Prioritas tinggi haruslah diberikan guna mengembangkan publikasi lokal seperti jurnal, kertas kerja, dan monograf yang perlahan akan melepaskan kalangan akademisi dari keterikatan tema-tema riset yang didikte oleh muatan publikasi Amerika dan Eropa. Jepang telah memberi contoh yang baik tentang bagaimana melakukan transformasi itu. Jepang tidak melakukan diskriminasi penilaian terhadap terbitan-terbitan di dalam negerinya.

Meskipun buku yang ditulis Farid Alatas sudah sangat sistematis dan disajikan dengan bahasa sesederhana mungkin, tetap saja buku tersebut lebih cocok dibaca oleh mereka yang telah cukup dalam bergelut dengan ilmu-ilmu sosial. Banyaknya contoh kasus yang dikemukakan secara sekilas membuat mereka yang awam akan sedikit kesulitan merangkai contoh-contoh yang disajikan menjadi sebuah gambaran utuh. Meskipun begitu, kehadiran buku tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi kalangan-kalangan ilmuwan yang siap untuk keluar dari zona 'kemapanan akademik' yang selama ini ternyata berisi peniruan-peniruan belaka yang minim koreksi (*captive mind*).<sup>18</sup>

Sejalan dengan gagasan Farid Alatas di atas, seruan Said Aqil Siradj yang juga menyuarakan kegelisahan, sudah semestinya diapresiasi, karena studi-studi sosial terhadap Dunia Ketiga cenderung tidak dilakukan secara objektif tetapi mengandung muatan asumsi inferioritas terhadap objek yang mereka teliti sehingga perumusan teori juga akan sangat dipengaruhi oleh posisi negara penjajah dan terjajah. Sebagai contoh gejala *Eurosentrimse* dalam studi sosial, adalah penelitian yang dilakukan oleh ilmuan Belanda terhadap masalah kemiskinan yang merajalela di pedesaan-pedesaan di daerah Jawa akhir abad ke-19. J.H. Boeke, ahli sosiologi dan antropologi ekonomi

---

<sup>18</sup>Yanu Endar Prasetyo, "Keluar dari Penjajahan Akademik", peresensi buku Syed Farid Alatas yang berjudul *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, pada *Harian Republika*.

di Universitas Leiden, sebagai universitas yang paling maju dalam kajian *indologi*, memimpin penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat pedesaan di Jawa disebabkan kekalahan mereka dalam persaingan ekonomi akibat dari mentalitas yang rendah dalam aktivitas ekonomi, yaitu sifat malas.<sup>19</sup> Sementara itu, fakta-fakta sosial lainnya seperti pemerasan dan eksploitasi kaum penjajah, dan pemiskinan secara terstruktur seperti rendahnya dukungan pendidikan bagi masyarakat tidak dijadikan indikator dan fokus studinya dalam merumuskan faktor penyebab kemiskinan tersebut, demikian penilaian Yudi Ahmad Faisal.<sup>20</sup>

### Ilmu Sosial Transformatif (Model Purwo Santoso)

Sebagai lembaga pengembangan ilmu, dalam pandangan Purwo Santoso, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin komunitas keilmuannya memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan mengembangkan ilmu. Namun, pada kenyataannya, ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa ilmu di negeri ini mengalami *kemandegan*, dan ada juga yang menilai terlilit krisis. Gejalanya antara lain tampak pada minimnya kontribusi para ilmuwan sosial Indonesia dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun metodologis. Ilmuwan sosial di negeri ini masih terkesan dan terhipnotis oleh para teoritikus asing. Ketika berdebat tentang kondisi keindonesiaan, pada umumnya, rujukan mereka adalah hasil pemikiran para *Indiolog* atau *Indonesianis non-Indonesia*, semisal teori *dual society* yang dirumuskan Booke, teori politik aliran yang ditawarkan Herbert Feith dan Lance Castle, dan ada teori tentang kekuasaan dalam

---

<sup>19</sup> Heri Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Rasmedia, 2007, hlm. 13.

<sup>20</sup> Yudi Ahmad Faisal, "Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat", [http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/23/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat/23 January 2011](http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/23/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat/23%20January%202011).

masyarakat Jawa yang ditawarkan oleh Benedict Anderson,<sup>21</sup> demikian pula dengan konsep Geertz tentang abangan, santri, dan priyayi dalam masyarakat Jawa<sup>22</sup>

Hal pertama yang disasar oleh Purwo Santoso dan dianggap menjadi penyebab lemahnya daya kritis para sarjana perguruan tinggi, baik S1, S2, dan S3, antara lain terkait dengan model pembelajaran yang dilakukan perguruan tinggi selama ini. Untuk menjelaskan kenyataan ini, Purwo merujuk pada studi Carlile tentang sistem informasi yang dilakukan dalam hubungan antar bangsa, yaitu adanya tiga derajat *learning organization*: (1) sintaktis, (2) semantik, dan (3) transformatif.<sup>23</sup> Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam derajat pembelajaran model *sintaktis*, perhatian utama adalah ketepatan menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Mereka hanya mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa adanya. Komunitas yang terlibat tidak hirau akan persoalan metodologis. Belajar pada dasarnya adalah hanya untuk *meniru dan meniru*. Obsesi mereka adalah penguasaan ontologis dalam bidang ilmunya.

Tataran kedua adalah pembelajaran model *semantik*. Pada tataran ini terjadi proses penafsiran terhadap fenomena atau teori-teori dari pada sekedar hanya menerima. Ada keberanian untuk melakukan penafsiran atau memahami makna yang tersirat di balik fenomena. Proses menafsir memang berisiko terjadinya kesalahan, tetapi pada saat yang sama juga berpotensi menghasilkan pengetahuan baru berkat kecanggihan atau kepiawaian metodologi keilmuan.

---

<sup>21</sup> Purwo Santoso, *Ilmu Sosial Transformatif*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 3.

<sup>22</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.

<sup>23</sup> Purwo Santoso, *Ilmu Sosial Transformatif*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 4.

Sedangkan pembelajaran model *transformatif* ditandai oleh kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang jelas dan pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati, dan menerapkan metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran konteks dan pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, mereka terus menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan.

Boleh jadi, salah satu penyumbang kemendegan ilmu sosial di Indonesia karena model pembelajarannya yang masih berwatak sintaktis. Pembelajaran yang berlangsung di perguruan tinggi sekedar untuk menyampaikan dan memberi tahu suatu teori dan tahu lebih banyak teori-teori. Ilmuwan sosial di sini, khususnya para dosen di perguruan tinggi, hanya berfungsi sebagai perantara yang mengoper ilmu-ilmu yang telah diperolehnya untuk disampaikan kepada para mahasiswa. Untuk menggairahkan pengembangan ilmu sosial, model pembelajaran yang mestinya dikembangkan di perguruan tinggi adalah model yang *transformatif*.

Hal kedua yang disasar dan menjadi tema utama dari pemikiran Purwo Santoso adalah apa yang disebutnya sebagai ilmu sosial transformatif. Ilmu sosial yang dimaksud di sini mencakup berbagai disiplin, termasuk Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, Antropologi, Sejarah, Ilmu Hukum dan seterusnya. Istilah *transformatif* di sini dipakai dalam pengertian yang longgar, sekedar untuk menandai cara kerja ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, namun peduli. Sungguh pun demikian, ilmu sosial transformatif bukanlah ilmu tentang ketrampilan (vokasi). Watak transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan teknis, melainkan ditentukan oleh komitmennya untuk mewujudkan realitas baru sesuai dengan yang diteorikannya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Purwo Santoso, *Ilmu Sosial Transformatif*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 7.

Watak *transformatif* tersebut tentu harus didasari dengan kejelasan pilihan epistemologisnya. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu sosial transformatif, keberadaan metode keilmuan yang mengedepankan obyektivitas tidak harus ditolak, namun harus disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan cara untuk mengkompensasi keperluannya untuk transformatif. Watak transformatif juga ditentukan oleh pilihan aksiologisnya. Ilmu sosial dikembangkan bukan sekadar akumulasi teori, melainkan juga untuk memperbaiki relasi sosial yang terjalin. Dan akhirnya, menghasilkan realitas sosial yang dinilai jauh lebih baik. Misal, ketika membahas *good governance*, maka kepeduliannya bukan hanya pada ukuran dan ciri-ciri *good governance*, melainkan sampai pada menghasilkan perilaku bersama yang memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang dimaksud.<sup>25</sup>

Untuk menuju pengembangan ilmu sosial transformatif ini perlu dipertimbangkan pentingnya *support system* dalam pengembangan kapasitas metodologis. Menurutnya, ada contoh yang bisa menjadi rujukan yaitu *London School of Economics and Political Science* yang mendirikan *Methodology Institute*. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawal kompetensi metodologi keilmuan dan metode penelitian civitas akademiknya. Setidaknya semua dosen dan kandidat doktor harus belajar di lembaga ini, meskipun tidak harus mengumpulkan SKS. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit yang menjadi agenda kolektif, antara lain: (1) pengrajin jejaring ilmuwan atau *social crafting*; (2) mobilisasi kegelisahan; (3) konversi kegelisahan menjadi karya-karya dan amalan ilmiah, serta; (4) reproduksi tapak akademik menjadi kultur akademik.

Sekali lagi, ketrampilan *social crafting* sangat diperlukan untuk menggalang agenda yang berbasis kegelisahan kolektif dalam komunitas keilmuan yang ada. Tokoh-tokoh kunci dalam komunitas yang ada dituntut untuk mengoptimalkan kepemimpinannya demi

---

<sup>25</sup> Purwo Santoso, *Ilmu Sosial Transformatif*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 9.

menghasilkan karya-karya yang menjawab tantangan yang telah dirumuskan. Lebih dari itu, perlu inovasi untuk memungkinkan produk-produk keilmuannya dapat dibaca dan disajikan ke hadapan publik.<sup>26</sup> Sebagai contoh, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta misalnya, sejak dua tahun lalu, telah didirikan sebuah forum yang diberi nama Forum Ilmu Sosial Transformatif (FISTrans Institute). Forum ini secara berkala melakukan diskusi bulanan dan pada saat tertentu menyelenggarakan seminar nasional dengan mengundang para narasumber yang memiliki kapasitas. FISTrans Institute antara lain telah menghadirkan Prof. Syed Farid Alatas (Universitas Nasional Singapura) dan Prof. Dr. Purwo Santoso (Fisipol UGM). Meskipun masih dalam bentuk pencarian format, FISTrans Institute sudah melahirkan dua buah buku dengan judul: (1) *Menuju Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia: Sebuah Gugatan atas Penjajahan Akademik*, dan (2) *Membongkar Hegemoni Negara Kapitalis atas Negara Berkembang: Mozaik Pemikiran Ilmu Sosial Profetik*.<sup>27</sup>

### **Ilmu Sosial Profetik (Model Kuntowidjoyo)**

Gagasan munculnya ilmu sosial profetik, bermula dan diawali dengan munculnya perdebatan di sekitar pemikiran Muslim Abdurrahman mengenai istilah Teologi Trans-formatif. Istilah ‘teologi’ yang digunakan di sini, adalah dimaksudkan agar agama diberi tafsir baru dalam rangka memahami realitas. Selanjutnya, metode yang efektif untuk maksud tersebut adalah dengan mengelaborasi ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Lingkup yang menjadi sasaran dari pemikiran ini adalah lebih pada rekayasa sosial untuk transformasi sosial.

---

<sup>26</sup> Purwo Santoso, *Ilmu Sosial Transformatif*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 12.

<sup>27</sup> Ajat Sudrajat, *Laporan Tahunan Dekan FIS UNY pada Dies Natalis Ke-48 FIS UNY*, Yogyakarta: FIS UNY, 2003.

Namun demikian, penggunaan istilah 'teologi' di sini, tampaknya, mengundang banyak pertanyaan, karena banyak yang memahaminya dalam kerangka aspek-aspek normatif yang bersifat permanen seperti pada pemahaman terhadap Ilmu Kalam atau Ilmu Tauhid. Untuk menghindari problem istilah yang berkepanjangan, Kuntowijoyo, dengan memperhatikan lingkup yang menjadi garapan adalah aspek yang bersifat empiris, histori, dan temporal, menurutnya sebutan 'ilmu sosial' lebih bisa diterima tanpa harus diberi pretensi doktrinal.

Sampai di sini, munculah gagasan 'Ilmu Sosial Transformatif'. Namun demikian, gagasan ini harus dibedakan dengan gagasan yang muncul belakangan yang dikemukakan Purwo Santoso di atas, yang merupakan judul pidato pengukuhan guru besarnya pada tahun 2011. Dalam benak-pikiran Kuntowijoyo selanjutnya, ilmu sosial yang bagaimanakah yang dapat dipakai untuk melakukan transformasi sosial?. Ilmu sosial tranformatif yang tergambar dalam pikiran Kuntowijoyo adalah ilmu sosial yang tidak seperti ilmu-ilmu sosial akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, yang tidak berhenti hanya untuk menjelaskan fenomena sosial, namun juga berupaya untuk mentransformasikannya. Tapi kemudian muncul persoalan, **ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa?.** Sampai di sini, menurut Kuntowijoyo, ilmu-ilmu sosial transformatif tidak bisa memberikan jawaban yang jelas.<sup>28</sup>

Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini adalah ilmu-ilmu sosial profetik, yaitu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena itu, ilmu sosial sosial profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam

---

<sup>28</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 86.

pengertian ini, maka ilmu sosial profetik secara sengaja memuat kandungan nilai-nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya.

Menurutnya, perubahan itu semestinya didasarkan pada cita-cita humanisasi-emansipasi, liberasi, dan transendensi. Tiga muatan nilai ini, ia ambil dari kandungan yang ada dalam QS Ali 'Imran (3), ayat 110: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...". Tiga muatan inilah yang menjadi ciri ilmu sosial profetik. Dengan kandungan nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi, ilmu sosial profetik diarahkan untuk rekayasa masyarakat menuju cita-cita sosio-etiknya di masa depan.<sup>29</sup>

Gagasan ilmu sosial profetik, dalam pengakuan Kuntowijoyo, sebenarnya juga diilhami oleh pemikiran Muhammad Iqbal, khususnya ketika Iqbal berbicara tentang peristiwa mi'raj Nabi Muhammad saw. Seandainya Nabi Muhammad saw adalah seorang mistikus atau sufi, kata Iqbal, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena telah merasa bersatu dengan Tuhan dan berada di sisi-Nya. Justru, yang terjadi adalah, Nabi Muhammad saw kembali ke bumi untuk menggerakkan dan melakukan perubahan sosial, untuk mengubah jalannya sejarah. Nabi Muhammad saw mulai melakukan transformasi sosial budaya berdasarkan cita-cita profetik.<sup>30</sup>

Tiga nilai yang menjadi muatan ilmu sosial profetik dijelaskan lebih lanjut oleh Kuntowijoyo sebagai berikut:

Pertama, tujuan *humanisasi* adalah memanusiaikan manusia. Ia melihat terjadinya proses dehumanisasi yang menimpa masyarakat dewasa ini. Masyarakat industrial yang sedang berjalan sekarang ini

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 87.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 87.



telah menempatkan manusia berada dalam masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Manusia mengalami objektivasi ketika berada di tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionalistik yang melihat manusia dengan cara parsial.

Humanisasi model Kuntowijoyo, menurut penjelasan dalam Wikipedia, sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang menjadi dasarnya.<sup>31</sup>

Kedua, tujuan *liberasi* adalah pembebasan dari kekejaman kemiskinan struktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan kelimpahan. Banyak orang yang terperangkap dalam kesadaran teknokratis dan tergusur oleh ekonomi raksasa. Oleh karena itu, manusia harus bisa membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang dibangunnya sendiri.

Liberasi dalam ilmu sosial profetik, seperti dipaparkan dalam Wikipedia, juga sejalan dengan prinsip yang ada dalam faham sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, dan teologi pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu sosial profetik adalah dalam konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam ilmu sosial profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan

---

<sup>31</sup> Wikipedia, "Ilmu Sosial Profetik", diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_Sosial\\_Profetik](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Sosial_Profetik).

kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran palsu.<sup>32</sup>

Ketiga, tujuan *transendensi* adalah menambahkan dimensi transedental dalam kebudayaan. Banyak orang yang sudah terperangkap dan menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan budaya yang dekaden. Menurutny, harus ada yang dilakukan untuk mengatasi dan memberikan jalan keluar atas masalah ini, yaitu membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi transedental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Dunia ini harus dihayati dan dirasakan sebagai rahmat Tuhan, sekaligus merasakan sentuhan kebesaran-Nya.<sup>33</sup>

Seperti telah dinyatakan di atas, transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknologi dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik, di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya untuk menuju kesadaran transedental. Nilai transendensi di sini dapat dan akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.<sup>34</sup>

Dengan ilmu sosial profetik, seorang ilmuwan sosial mestinya melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu reorientasi terhadap *mode of thought* atau *mode of inquiry*, bahwa sumber ilmu pengetahuan

---

<sup>32</sup> Wikipedia, "Ilmu Sosial Profetik", diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_Sosial\\_Profetik](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Sosial_Profetik).

<sup>33</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 88.

<sup>34</sup> Wikipedia, "Ilmu Sosial Profetik", diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_Sosial\\_Profetik](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_Sosial_Profetik).

itu tidak hanya dari rasio dan empiri, tetapi juga dari wahyu.<sup>35</sup> Sementara itu, apabila ilmu sosial yang akan dibangun bercorak indigenis, menurut Heri Santoso dan Listiyono Santoso, sumber pengetahuan meliputi empiri, rasio, intuisi, kepercayaan, otoritas, dan wahyu. Masing-masing sumber pengetahuan tersebut diakui, namun ditempatkan secara proporsional.<sup>36</sup>

Berangkat dari ilmu sosial profetik ini, demikian menurut Kuntowijoyo, sesungguhnya para ilmuwan sosial Indonesia tidak perlu galau dan mengidap kekhawatiran yang berlebihan terhadap dominasi sains Barat. Betatapun dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah teori, seorang ilmuwan tidak dapat menghindarkan terjadinya *peminjaman* dari dan *sintesis* dengan khazanah ilmu Barat. Sekalipun pada tujuan akhir yang ingin dicapai harus terus berusaha untuk *mendekati cita-cita otentik*, akan tetapi dalam proses globalisasi dan universalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, seorang ilmuwan harus tetap membuka diri terhadap seluruh warisan kebudayaan.<sup>37</sup>

Selain dua gagasan yang dikemukakan Kuntowijoyo dengan Ilmu Sosial Profetiknya (ISP) dan Purwo Santoso dengan Ilmu Sosial Transformatifnya (IST), Farid Alatas mengemukakan sifat diskursus alternatif yang ditawarkannya dengan memerinci ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Titik berangkat diskursus alternatif adalah kritik terhadap Eurosentrisme dan Orientalisme dalam ilmu sosial;

---

<sup>35</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 88.

<sup>36</sup> Hari Santoso dan Listiyono Santoso, *Filsafat Ilmu Sosial: Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Gama Media, 2003, hlm. 77.

<sup>37</sup> Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 89.

2. Diskursus alternative mengangkat masalah metodologis dan epistemologis dalam telaah masyarakat, historiografi, atau filsafat sejarah;
3. Diskursus alternatif secara implisit atau eksplisit menaruh perhatian pada analisis masalah yang ditimbulkan oleh pembagian kerja dalam ilmu sosial, di mana ilmu sosial Asia mendapati dirinya dalam keadaan konformitas, tiruan, dan tidak orisinal;
4. Diskursus alternatif berkomitmen untuk merekonstruksi diskursus sosial dan sejarah mencakup pembangunan konsep, kategori, dan agenda riset yang relevan dengan kondisi local atau regional;
5. Diskursus alternatif berkomitmen untuk memunculkan masalah orisinal dalam telaah sosial dan sejarah;
6. Diskursus alternatif mengakui semua peradaban dan praktik budaya sebagai sumber ide ilmu sosial; dan
7. Diskursus alternatif tidak mendukung penolakan atas ilmu sosial Barat secara *in toto* (keseluruhan).<sup>38</sup>

## Catatan Penutup

Manusia sejati atau manusia yang menjadi, menurut Ali Syariati, adalah manusia tiga dimensional, manusia dengan tiga talenta utama, yaitu kesadaran, kemampuan berkehendak, dan daya cipta. Manusia tiga dimensional ini adalah manusia yang selalu berperang melawan dan berusaha membebaskan diri kekuatan deterministik yang cenderung membatasi dan membelenggu kesadaran diri, kemampuan berkehendak, dan daya ciptanya.<sup>39</sup> Seseorang yang memiliki kesadaran yang penuh akan diri dan masyarakatnya, diperkuat dengan

---

<sup>38</sup> Syed Farid Alatas, *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia: Terhadap Terhadap Eurosentrisme*, Jakarta: Mizan Publika, 2010, hlm. 77-78.

<sup>39</sup> Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 60.

kemampuan, dan daya kreatifnya, ia dengan segera dapat memahami realitas dan selanjutnya akan mampu dan sekaligus melakukan kontruksi terhadap diri dan masyarakatnya. Para ilmuwan sosial Indonesia, dalam konteks ini, seperti yang dikemukakan oleh Alatas, akan segera terbebas dari apa yang ia sebut dengan benak terbelenggu (*captive mind*). *Captive mind* di sini didefinisikan sebagai pikiran meniru yang tak kritis, terdominasi sumber-sumber eksternal, yang menyimpang dari perspektif inde-penden.<sup>40</sup>

Searah dengan pemikiran di atas, ada baiknya untuk mempertimbangkan langkah yang dilakukan oleh para penggagas *indigenous psychology* di masyarakat Asia Timur yang mengusulkan strategi epistemologis dengan menggunakan *realisme konstruktif* sebagai dasar filosofisnya.<sup>41</sup> Dengan menggunakan *realism konstruktif* ini, para ilmuwan sosial dapat mengonstruksikan *microworld* teori ilmiah, dan menggunakan *microworld* ini sebagai kerangka acuan untuk melaksanakan penelitian empirik tentang *lifeworld* masyarakatnya.

---

<sup>40</sup> Syed Farid Alatas, *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia: Terhadap Terhadap Eurosentrisme*, Jakarta: Mizan Publika, 2010, hlm.35.

<sup>41</sup> Uichol Kim, Kuo-Shu Yang, dan Kwang-Juo Hwang (ed.), *Indigenous and Cultural Psychology: Memahami Orang dalam Konteksnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 167.